

## **Kemampuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Investasi Dalam Menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat**

**Helly Suharlina\***

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi daerah yang merupakan proses kerja bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah guna membuka lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli Daerah ( PAD ), Belanja Daerah dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Dana Alokasi Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah harus lebih optimal dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di setiap daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

***Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi.***

### **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi daerah sangat penting dalam proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah. Untuk itu peran pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk membiayai apa saja penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah masing – masing dituntut lebih aktif lagi dalam mengelola dana penerimaan pemerintah. Otonomi daerah harus mampu untuk menggali sumber – sumber keuangan daerah sendiri dalam rangka untuk membiayai apa saja penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Untuk itu ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga daerah harus menggali secara optimal potensi yang ada di daerahnya masing – masing. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan prinsip kewenangan dilimpahkan ke daerah maka dana untuk mengelola kewenangan harus juga dilimpahkan ke daerah tersebut, sehingga daerah mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri.

Untuk pelaksanaan kewenangan terhadap pemerintah daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), disamping itu ada sumber lain dari pendanaan sendiri yaitu

---

\* E-mail : Hellysuharlina2@gmail.com

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada setiap daerah sumber daya yang dimiliki berbeda – beda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, PAD yang paling besar berada di Kota Pontianak sedangkan yang paling kecil pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi. Daerah dapat dikatakan mandiri jika semua pengeluaran pemerintah daerah dapat didanai dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Dengan semakin pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka mengakibatkan semakin kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima pemerintah daerah. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi yang terbesar pada belanja daerah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih mengharapkan dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015 setiap tahunnya mengalami kenaikan, Belanja daerah yang terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya sedangkan belanja daerah yang terkecil adalah Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau dan Kota Singkawang. Dana Alokasi Umum (DAU) yang paling besar dalam membiayai belanja daerah, kemudian diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau dilihat dari kondisi tersebut bearti Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), hal ini akan berdampak pada pemerintah daerah yang tidak berusaha maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mencerminkan belum tercapainya tujuan dari otonomi daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada didaerah agar pendapatan daerah meningkat, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Jika Pemerintah daerah masih mengandalkan dana dari pusat maka dampaknya adalah daerah tidak akan berusaha secara maksimal dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dimana suatu daerah menggunakan PDRB untuk investasi. Dengan tingginya investasi yang ditanamkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Peran investasi dalam pembangunan salah satunya adalah mengurangi jumlah pengangguran karena penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi dapat diartikan pengeluaran yang dapat menambah jumlah alat produksi dalam masyarakat sehingga akan menambah pendapatan serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, setiap Negara senantiasa akan berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat menarik atau menggairahkan investasi. Untuk mendorong perkembangan ekonomi maka perlu adanya modal yang dapat menaikkan tenaga produksi yang semuanya membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengolah investasi tersebut. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri menjadi sumber pembiayaan bagi wilayah serta mampu untuk memberikan kontribusi atau sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi alat ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dicapai di suatu daerah atau di suatu negara. Pembangunan ekonomi yang merupakan suatu proses bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi juga bearti interaksi setiap kegiatan pembangunan yang akan membuka

lapangan pekerjaan sehingga pengangguran akan berkurang. Menurut Bappenas dalam Sulistiowati (2012) bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Fakta yang ditemui adalah Indeks Pembangunan Manusia secara nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota masih rendah, yaitu masih pada kategori Medium Human Development. Relatif rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia tersebut berarti telah terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno bahwa dalam analisis makro ekonomi istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi juga dapat menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang. Semakin tinggi jumlah PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan tinggi dan sebaliknya jika jumlah PDRB menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Dengan semakin meningkatnya PDRB maka merupakan suatu gambaran tingkat pendapatan masyarakat semakin baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 – 2015 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif disetiap tahunnya. Adapun pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 adalah kabupaten Kubu Raya sebesar 6,21 % sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sanggau. Kemudian Kota Pontianak pertumbuhannya hanya 4,84 % kalah saing dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun tujuan tersebut adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan Pendapatan asli Daerah (PAD) selalu diupayakan mengingat hal tersebut adalah merupakan penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Atep Adya Barata (2004) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Menurut Widjaja (2002) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain – lain.

Komponen tersebut sangat penting dan masing – masing memberikan kontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Koswara menyatakan bahwa pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah sebagai berikut : “ Daerah otonomi harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan Negara “. Menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dengan demikian kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana ditingkat pusat.

### 2.2. Dana Alokasi Umum ( DAU )

Untuk dapat jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjadi satu kesatuan dengan penerimaan APBD. Dana alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan daerah kabupaten ditetapkan masing-masing 10 % dan 90 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) .

Dana Alokasi Umum (DAU) bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi seluruh bobot daerah dengan bobot seluruh daerah diseluruh Indonesia. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan oleh menteri keuangan melalui ditjen anggaran secara berkala dari total Dana Alokasi Umum (DAU) perdaerah.

### 2.3. Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah bisa mencerminkan biaya yang dikeluarkan pemerintah guna melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Menurut Idris (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya antara lain :

1. Pengeluaran Negara yang bersifat self-liquidating (yang mampu memberikan keuntungan), yakni pengeluaran Negara berupa pemberian jasa kepada masyarakat sehingga akan mendapat pembayaran kembali dari masyarakat dari barang/jasa yang diberikan.
2. Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif yaitu pengeluaran Negara yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya.
3. Pengeluaran uang Negara yang tidak produktif misalnya pengeluaran untuk membuat monument yang tidak menghasilkan pemasukan kembali.
4. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang.
5. Pengeluaran dalam rangka pemberian subsidi.

Pengeluaran pemerintah serta kegiatannya semakin lama semakin meningkat, Hal ini ada beberapa penyebabnya antara lain :

- a. Meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban.
- b. Meningkatnya fungsi kesejahteraan.
- c. Meningkatnya fungsi perbankan.
- d. Meningkatnya fungsi pembangunan.

Menurut Darise (2008) menyatakan bahwa untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

1. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang penganggarnya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap

bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap ( pembayaran gaji dan tunjangan ) dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang diperlukan secara periodik.

## 2. Belanja langsung

Merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa sebagai kewajiban pemerintah dalam mengurangi nilai kekayaan bersih. Menurut Yuwono (2005) menyatakan bahwa semua pengeluaran kas atau kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun periode anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah merupakan belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi bagian dana yang menjadi kewajiban daerah satu periode tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut Sumarsono (2010) Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD diprioritaskan untuk :

- Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemda, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Pelaksanaan urusan wajib daerah digunakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pada suatu daerah tersebut dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang dilakukan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

Teori pengeluaran pemerintah berdasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Teori ini menunjukkan tahapan pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Jadi kegiatan yang dilakukan pemerintah akan mendorong jumlah pengeluaran daerah sehingga akan mengakibatkan terjadinya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## 2.4. Investasi

Investasi merupakan faktor yang paling penting guna mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomia suatu Negara dan wilayah. Dalam perekonomian dikenal istilah investasi dan setiap pelaku usaha akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Nurkse menyatakan bahwa “Masyarakat tidak menggunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal seperti perkakas, alat-alat mesin, fasilitas angkutan pabrik dan segala macam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif “. Menurut Samuelson dan Nordhaus ( 2009 ) “ perusahaan – perusahaan mengadakan investasi agar memperoleh laba dan keuntungan “. Karena barang-barang modal berumur lebih dari sekedar satu tahun maka keputusan investasi tergantung pada :

- Tingkat permintaan atas output yang dihasilkan oleh investor baru.
- Tingkat suku bunga dan pajak yang mempengaruhi biaya investasi.
- Harapan dan pemikiran kalangan usahawan atas situasi ekonomi di masa depan.

Menurut Nopirin ( 2007 ) bahwa kedudukan investasi dalam pertumbuhan ekonomi yaitu kedudukan penanaman modal ( investasi ) dalam GDB merupakan total dari produksi nasional dalam jangka panjang waktu tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan total produksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu Negara dalam melaksanakan aktivitas penanaman modal ( investasi ). Menurut Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kemajuan dengan adanya investasi yang berperan penting dalam memperbesar kapasitas produksi

melalui pembentukan modal, menaikkan pendapatan nasional dan terciptanya lapangan kerja baru yang kemudian berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti serta untuk menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Menurut Sukirno (2013) menyatakan bahwa Investasi adalah penanaman modal atau pengeluaran perusahaan atau penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal atau investor bertujuan untuk mencari keuntungan, dengan tingginya tingkat keuntungan yang akan diperolehnya maka akan menjadi peran besar dalam penentu tingkat investasi yang akan ditanamkan.

### 2.5. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu Negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikasi untuk keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Todaro (2011:170-173) Ada tiga komponen yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

- a. Akumulasi Modal (*capital accumulation*), mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan ketrampilan kerja.
- b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yaitu bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja besar berarti pekerja produktif banyak, jumlah penduduk besar secara menyeluruh akan memperbesar ukuran pasar dalam negeri
- c. Kemampuan teknologi meningkatkan aplikasi pengetahuan ilmiah baru, dalam bentuk temuan dan inovasi, berkenaan dengan modal fisik dan modal manusia.

Menurut Boediono (2012 :1-2) mengemukakan secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pertama aspek proses pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Oleh karena itu dapat dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Boediono (2012) mengemukakan secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pertama aspek proses pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Oleh karena itu dapat dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Simon Kuznet dalam Djalil (2014) memberikan definisi pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara dalam jangka panjang untuk menyediakan jenis

barang-barang ekonomi yang semakin banyak kepada penuduknya, yang tumbuh sesuai dengan kemampuan dari kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkan. Menurut Kuncoro (2004) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita yang terjadi dalam jangka panjang dimana terdapat kecenderungan peningkatan output perkapita yang bersumber dari dalam kegiatan perekonomian tersebut yaitu kemampuan yang berada dalam perekonomian itu sendiri, bukan kemampuan bersifat sementara dan dari luar kegiatan perekonomian tersebut. Proses pertumbuhan itu sendiri akan menimbulkan suatu peningkatan bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi sebagai interaksi berbagai faktor yang ada antara lain penduduk, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi serta skil. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk itu harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan diantaranya adalah perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah dan melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan riil semakin berkembang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan presentasi pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya.

### 3.METODE PENELITIAN

#### 3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel - variabel dependen.

#### 3.2. Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta instansi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari data time series dan data cross section.

#### 3.3. Analisis data

##### 1. Regresi Linier Berganda / Regesi Linier Multipel

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi  
 b<sub>0</sub> = Konstanta / intercept

$b_1, b_2, b_3, b_4$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
$X_2$	= Dana Alokasi Umum (DAU)
$X_3$	= Belanja Daerah
$X_4$	= Investasi
$e$	= Error term

## 2. Uji Statistika

### a. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat kepercayaan/Keyakinan 95 %.

Kreteria pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah :

- Bila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak
- Bila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

Atau :

- Bila Probabilitas  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak
- Bila Probabilitas  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

### b. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan/keyakinan 95 %.

Kreteria pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah :

- Bila  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak
- Bila  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

Atau :

- Bila Probabilitas  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak
- Bila Probabilitas  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Dengan koefisien determinasi dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 maka kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi atau pengaruh akan semakin baik dan jika nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan program E-views maka diperoleh hasil sebagai berikut :



**Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda**

Variabel	Coefficient	Prob.
C	6,108455	0,0993
Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	0,294749	0,0219
Dana Alokasi Umum ( DAU )	0,269629	0,1555
Belanja Daerah	0,090826	0,0229
Investasi	0,139491	0,0014

Persamaan Regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,108455 + 0,294749 X_1 + 0,269629 X_2 + 0,090826 X_3 + 0,13949X_4 \dots\dots\dots (2)$$

Hasil Regresi Linier Berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta (C)  
 Nilai koefisien konstanta (C) sebesar 6,108455 artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah dan Investasi tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,108455 persen.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,294749 artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,294749 persen dengan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU), belanja daerah, investasi tetap (konstan).
- c. Dana Alokasi Umum (DAU)  
 Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,269629 artinya jika Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,269629 persen dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan investasi tetap (konstan).
- d. Belanja Daerah  
 Nilai koefisien Belanja Daerah sebesar 0,090826 artinya jika Belanja Daerah mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,090826 persen dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan investasi tetap (konstan).
- e. Investasi  
 Nilai koefisien Investasi sebesar 0,139491 artinya jika Investasi mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,139491 persen dengn asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah tetap (konstan).

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah dan Investasi masing – masing berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### 3. Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### 4. Investasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2. Uji t**

Variabel	t-statistic	Prob.	Keputusan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,363018	0,0219	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,441376	0,1555	Tidak signifikan
Belanja Daerah	2,344935	0,0229	Signifikan
Investasi	3,378486	0,0014	Signifikan

### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan Investasi berpengaruh secara simultan atau serempak terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai F-Statistik sebesar 9,671353 dengan probabilitas 0,0000 hal ini berarti bahwa Pendapatan asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan Investasi secara bersama - sama ( simultan ) berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengukur besarnya sumbangan / kontribusi dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Hasil koefisien determinasi (  $R^2$  ) sebesar 0,759719 artinya sebesar 75,9719 % dari variabel Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan Investasi mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sisanya 24,0281 % di pengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak pada peningkatan PDRB, hal ini dikarenakan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka dana yang ada di daerah juga akan meningkat sehingga pemerintah daerah akan lebih optimal dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat maka akan berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga akan mengakibatkan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat lebih mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah Satu sumber dari pembelanjaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini terjadi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan pula dana daerah juga akan meningkat, dengan demikian pemerintah daerah akan lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi yang ada disetiap daerah masing-masing. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pembangunan juga akan meningkat misalnya membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menambah dana pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pada masing – masing daerah dan sebagai tugas dari pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai pengeluaran daerah tetapi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan setiap daerah berbeda – beda tergantung pada potensi sumber – sumber dan kekayaan alam atau jumlah penduduk yang ada didaerah tersebut. Pada umumnya daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, maka daerah tersebut masih mengandalkan penerimaan dari dana perimbangan.

Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Maka kepada setiap daerah dituntut untuk harus dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber – sumber yang ada di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut dibelanjakan tidak ada batasan sehingga daerah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan yang diperlukan. Masalah yang muncul adalah apakah daerah mampu dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini berakibat ketergantungan daerah pada dana perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya dikelola dengan selektif sehingga dananya tidak sia-sia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai sehingga akan berdampak berkurangnya belanja modal yang berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta penanggulangan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak digunakan untuk pembangunan misalnya infrastruktur, perluasan lapangan pekerjaan dan lain – lain yang berdampak bagi masyarakat dengan adanya pelayanan publik yang lebih baik sehingga akan dapat mengurangi

tingkat pengangguran. Dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) teralokasi dengan baik maka akan sangat penting bagi suatu daerah sebagai pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai salah satu pendapatan daerah yang digunakan sebagai modal guna untuk kebutuhan daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### 4.2.3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Belanja daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini belanja modal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya belanja modal yaitu dengan penyediaan atau perbaikan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah selain untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga mengurangi pengangguran. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan mengakibatkan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tugas pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang diberikan kewenangan fiskal yang didasarkan pada prinsip agar alokasi sumber daya akan lebih efisien dan efektif. Dalam suatu kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat lebih tahu apa yang dibutuhkan daerahnya sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 4.2.4. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Investasi yang ditanamkan tersebut yang digunakan dalam pembelian modal oleh para investor, pada saat investor melakukan penanaman modal maka ada sejumlah pembelian barang – barang yang digunakan untuk produksi misalnya pembangunan pabrik, jembatan serta jalan dengan demikian maka akan membuka lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hal ini dikarenakan investasi masih sangat kurang menggembirakan yang menyebabkan kapasitas perekonomian khususnya sektor industri pengolahan yang tumbuh sangat lambat, rendahnya permintaan masyarakat menyebabkan tingkat kapasitas produksi belum mengalami peningkatan. Perkembangan di sisi produksi dan investasi mengindikasikan bahwa perbaikan beberapa indikator moneter belum direspon secara optimal oleh kegiatan di sektor riil.

Sektor pertanian masih merupakan sebagai komoditi unggulan sebagai penghasil nilai tambah bagi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Peranan investasi terhadap kapasitas produksi sangatlah besar hal ini dikarenakan investasi sebagai penggerak dalam perekonomian yaitu berupa peningkatan kualitas faktor produksi serta penambahan faktor produksi antara lain misalnya tenaga kerja. Investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam perekonomian, dengan hadirnya investasi disuatu daerah dipengaruhi beberapa faktor yaitu utilitas, birokrasi, kualitas sumber daya manusia, regulasi, stabilitas politik dan keamanan dan sosial budaya sehingga perlu kebijakan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat diharapkan akan berdampak pada peningkatan terciptanya lapangan pekerjaan. Peran investasi di

Kalimantan Barat sangatlah besar karena investasi menjadi penggerak perekonomian baik berupa penambahan tenaga kerja serta meningkatnya kualitas faktor produksi. Dengan meningkatnya nilai investasi di Kalimantan Barat karena para investor merasa aman serta informasi tentang berbagai kegiatan investasi di Kalimantan Barat hal ini tidak terlepas dari peran masyarakat di Kalimantan Barat.

Dengan perbaikan kebijakan, menciptakan iklim yang kondusif serta pelayanan yang baik maka respon positif oleh para investor sehingga mereka akan menanamkan modalnya di Kalimantan Barat. Sehingga dampak dari hal tersebut adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang akan mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat meningkat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

## **5. KESIMPULAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak pada peningkatan PDRB hal ini dikarenakan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan berdampak pada masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat di Provinsi Kalimantan Barat.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai pengeluaran daerah akan tetapi Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan tidak digunakan untuk infrastruktur sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tugas pemerintah daerah yang diberikan kewenangan fiskal yang didasarkan pada prinsipnya agar efisiensi dan efektif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan investasi sebagai penggerak perekonomian baik berupa penambahan tenaga kerja serta meningkatkan faktor produksi. Dengan perbaikan kebijakan menciptakan iklim yang kondusif serta pelayanan yang baik maka respon positif oleh para investor sehingga mereka akan menanamkan modalnya di Kalimantan Barat. Hal ini berdampak terjadinya penyediaan lapangan kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, MD. (2012). *Ekonometrika (Esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews)*, Jakarta, Erlangga.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat) *Pekbis Jurnal*. 8(1), 1-3.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Chalid, P. (2005). *Keuangan Daerah, Investasi Dan Desentralisasi*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Davey, K. (1998). *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI, Jakarta.
- Gujarati, D. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 3, Jilid 2, Jakarta, Erlangga.
- Halim, A. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Husna, A. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mengembangkan Wilayah Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau*.
- Idris, A. *Ekonomi Publik*, Deepublish, Yogyakarta.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Kaho, J.R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koswara, E. (2000). *Menyongsong pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999*, CSIS XXIX No. 1, Jakarta.
- Koswara, E. (1999). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Kuncoro, M. (2003). *metode Riset Untuk Bisnia Dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Mangkoesebroto, G. (2010). *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, BPFE.
- Mankiw, N.G, Euston , Peter W. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta, JSalemba Empat.
- Putri, .E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. 5(2), 173-186.
- Rahayu, A.S. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sidik, M & Robert, S. (2002). *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

- Setiyawati. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Pendekatan Analisis Jalur, *jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Sukirno, S. (1995). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur). *Jurnal STIE Semarang*, 8(1), 2252-2282.
- Tambunan, T,T.H. (2011). *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Todaro. (2011). *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas, Jakarta, Erlangga.
- Widjaja, H. (2009). *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, PT. Rajawali Pers.
- Widjaja, H. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 33 tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yani, A (2013), *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.